



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa 3 September 2024
Waktu	: 16.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2025; 2. isu-isu aktual.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 39 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri Sosial beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 16.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial RI dengan agenda: **“Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025 dan Isu-isu Aktual”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp77.188.005.512.000,00 (*tujuh puluh tujuh triliun seratus delapan puluh delapan miliar lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah*), dengan rincian berdasarkan Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

No.	Unit Kerja Eselon I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	643.575.933.000
2	Inspektorat Jenderal	43.259.329.000
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	44.449.702.424.000
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.333.370.055.000
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	30.718.097.771.000
Total		77.188.005.512.000

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Sosial RI untuk menyelaraskan program perlindungan sosial dengan program Pemerintahan berikutnya.

2. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.613.495.798.950,00 (*sembilan triliun enam ratus tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), yang akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas perlindungan sosial dan dukungan manajemen, dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian Per Unit Kerja Eselon I	Volume	Indeks	Anggaran	
A. Ditjen Rehabilitasi Sosial					
1	Bantuan Permakanan Lansia	100.000 Org	365 hari	30.000	1.095.000.000.000
a.	Biaya Pengiriman Pokmas	100.000 Org	365 hari	2.000	73.000.000.000
b.	Dukungan Pelaksanaan Permakanan	1 Keg			44.383.000.000

2	Bantuan Permakanan Penyandang Disabilitas	42.445 Org	365 hari	30.000	464.772.750.000
a.	Biaya Pengiriman Pokmas	42.445 Org	365 hari	2.000	30.984.850.000
b.	Dukungan Pelaksanaan Permakanan	1 Keg			15.146.000.000
3	Bantuan YAPI	378.755 Org	12 bln	200.000	909.012.000.000
	Dukungan Pelaksanaan YAPI	1 Keg			22.138.540.000
4	Alat Bantu	27 UPT			45.291.893.000
Jumlah					2.699.729.033.000
B. Ditjen Pemberdayaan Sosial					
1	Bantuan Sosial Program Sembako	8.817.023 KPM	1 Bln	200.000	1.763.404.600.000
Jumlah					1.763.404.600.000
C. Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial					
1	Honorarium SDM PKH	14.590 Org	12 Bln	3.200.000	560.256.000.000
2	Operasional P2K2	14.590 Org	1 Thn	1.500.000	21.885.000.000
3	Dukungan Operasional SDM PKH	1 Keg	1 Keg		11.205.120.000
Jumlah					593.346.120.000
D. Sekretariat Jenderal					
1	Sertifikasi SDM Kesos	11.315 Org		759.638	8.595.302.000
2	Akreditasi Lembaga Kesos	625 LKS		3.137.902	1.961.188.750
3	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	3.215 Org		4.625.048	14.869.529.320
4	Pelatihan Teknis ASN	911 Org		3.106.000	2.829.566.000
5	Pelatihan Teknis Non ASN	1.900 Org		7.300.000	13.870.000.000

6	Proyeksi Kebutuhan Penambahan Belanja Pegawai	41.256 Org			4.429.289.975.168
7	Perbaiki Sarana dan Prasarana Sentra	6 Balai Besar dan 31 Sentra			76.531.538.000
8	Pemeliharaan NOC/Data Center	1 Kegiatan			9.068.946.712
Jumlah					4.557.016.045.950
Total Usulan Tambahan Anggaran					9.613.495.798.950

3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain sebagai berikut:
- Memperjuangkan kenaikan honorarium dan dukungan operasional untuk pilar kesejahteraan sosial.
 - Memperhatikan kesejahteraan kelompok masyarakat lanjut usia.
 - Mendorong keberlanjutan program-program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti Program Sembako dan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
 - Memastikan program-program Kementerian Sosial dapat bekerja efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan, baik rentan miskin maupun miskin ekstrem, sehingga bisa memperkuat kelompok kelas menengah.
 - Memberikan perhatian yang lebih baik pada nasib anak-anak yatim-piatu.
 - Mempersiapkan pelaksanaan program Asta Cita yang menjadi program prioritas Pemerintahan yang akan datang, seperti peningkatan kualitas SDM melalui pemberian makan bergizi, pemberdayaan kelompok rentan dan kelompok masyarakat yang termarginalkan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.35 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.